



Implementasi Kebijakan Pengembangan Daerah Wisata oleh Pemerintah Kabupaten Karo (Studi Deskriptif Terhadap Wisata Danau Lau Kawar)

Implementation of Tourism Area Development Policy by the Karo Regency Government (Descriptive Study on Lau Kawar Lake Tourism)

Yiska Okdamaiyanti¹⁾, Indra Muda²⁾* & Nina Angelia¹⁾

- 1) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia
2) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Danau Lau Kawar berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Fokus penelitian mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, kondisi lingkungan, serta disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen kebijakan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengembangan pariwisata telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, implementasinya belum optimal. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya promosi wisata, minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kurangnya sumber daya manusia dan finansial menjadi kendala utama. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, diperlukan strategi yang mencakup perbaikan infrastruktur, optimalisasi anggaran, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Perkembangan Pariwisata.

Abstract

This study analyzes the implementation of the policy for the development of Lake Lau Kawar tourist attractions based on the Van Meter and Van Horn policy implementation theory. The focus of the research includes policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, communication between implementing agencies, environmental conditions, and implementing dispositions. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data is collected through in-depth interviews, direct observations, and analysis of policy documents. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The validity of the data is maintained through triangulation of sources and methods. The results of the study show that although the tourism development policy has been regulated in Regent Regulation No. 32 of 2019 concerning Tourism Villages, its implementation has not been optimal. Limited infrastructure, lack of tourism promotion, lack of coordination between stakeholders, and lack of human and financial resources are the main obstacles. To increase the effectiveness of implementation, a strategy is needed that includes improving infrastructure, optimizing the budget, and increasing community involvement in tourism management.

Keywords: Policy Implementation; Tourism Development.

How to Cite: Okdamaiyanti, Y., Muda, I., & Angelia, N. (2025). Implementasi Kebijakan Pengembangan Daerah Wisata Oleh Pemerintah Kabupaten Karo (Studi Deskriptif Terhadap Wisata Danau Lau Kawar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(2): 179-185

*E-mail: indramuda@staff.uma.ac.id

ISSN 2722-1148 (Online)



PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah karena berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Sebagai industri berbasis jasa, pariwisata mencakup berbagai aktivitas seperti akomodasi, transportasi, kuliner, dan atraksi wisata (Muda et al., 2018; Setiono et al., 2021). Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat meningkatkan daya tarik destinasi dan memperkuat identitas lokal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi (Silviana & Mubarak, 2020; Sinuhaji et al., 2019).

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar karena keanekaragaman budaya, kekayaan alam, dan sejarah yang tersebar di berbagai daerah. Setiap destinasi menawarkan keunikan tersendiri yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola sektor ini agar dapat berkembang secara optimal (Bagiastuti, 2017; Daulay et al., 2020). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan pariwisata harus terstruktur dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat (Mariana Br Simamora et al., 2022; Nur Wijayanti, 2017).

Kabupaten Karo, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi wisata yang besar. Dengan luas wilayah 2.127,25 km² dan populasi sekitar 404.998 jiwa, daerah ini terletak di dataran tinggi Bukit Barisan dengan iklim sejuk yang berkisar antara 16 hingga 17 derajat Celcius. Kabupaten Karo memiliki berbagai destinasi wisata unggulan, termasuk wisata alam, budaya, dan agrowisata. Data kunjungan wisatawan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019, dengan kenaikan sebesar 112.022 pengunjung. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan drastis akibat pembatasan mobilitas masyarakat (Nugraha, 2022; F. R. Y. dan R. N. Putri, 2020; Simarmata & Saragih, 2020).

Salah satu destinasi unggulan Kabupaten Karo adalah Danau Lau Kawar, yang telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 08/Kpts/II/1989. Terletak di Kecamatan Naman Teran, danau ini berjarak sekitar 69 km dari Kota Medan dan dapat ditempuh dalam tiga jam perjalanan. Selama perjalanan, wisatawan disugahi pemandangan pedesaan dengan hamparan kebun sayur dan pembibitan jeruk yang menjadi potensi pertanian masyarakat setempat. Keunikan lanskap dan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar danau menjadi daya tarik tersendiri.

Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata. Regulasi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pariwisata desa sebagai penggerak ekonomi daerah dengan tetap mempertahankan prinsip keberlanjutan. Implementasi kebijakan ini meliputi peningkatan destinasi wisata desa, pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata, serta penerapan nilai-nilai sapta pesona dalam industri pariwisata lokal. Salah satu target utama kebijakan ini adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melestarikan budaya dan menciptakan atraksi wisata yang menarik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh koordinasi, partisipasi masyarakat, teknologi, dan infrastruktur. Rahmawati (2019) menemukan bahwa kurangnya koordinasi dan keterbatasan anggaran menghambat pengelolaan desa wisata di Sleman. Saputra dan Rahayu (2020) menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam ekowisata di Bromo Tengger Semeru, sementara Putri et al. (2021) menunjukkan bahwa pemasaran digital meningkatkan kunjungan wisatawan di Bali. Wijaya (2022) menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama dalam

pengelolaan Danau Toba. Temuan ini relevan dengan pengembangan Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo, yang juga memerlukan strategi kebijakan berbasis koordinasi yang kuat, dukungan masyarakat, serta peningkatan fasilitas dan teknologi untuk meningkatkan daya tarik wisata.

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan Danau Lau Kawar masih menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur yang belum optimal, kurangnya promosi wisata, serta keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pengembangan destinasi ini. Selain itu, belum adanya strategi terpadu dalam pengelolaan kawasan wisata juga menghambat peningkatan daya tarik wisatawan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya dalam pengelolaan Danau Lau Kawar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing pariwisata di Kabupaten Karo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (2009), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pengelolaan wisata secara mendalam dengan mengamati kondisi lapangan, sistem kebijakan, serta dampak implementasi kebijakan terhadap pengembangan Danau Lau Kawar sebagai destinasi wisata. Sebagaimana dikemukakan oleh Jary dan Jary (2019), penelitian kualitatif mengandalkan kemampuan peneliti dalam mengamati dan mewawancarai secara empatis untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual. Hal ini sesuai dengan pandangan Bungin (2011), yang menegaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis realitas sosial guna mengungkap karakteristik utama fenomena yang diteliti.

Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi guna mendapatkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah pemahaman terhadap pola dan hubungan antarvariabel yang ditemukan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan interpretasi berbasis teori Van Meter dan Van Horn (1975), yang menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, termasuk pemerintah daerah, pengelola wisata, serta masyarakat sekitar Danau Lau Kawar. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen kebijakan guna memastikan akurasi temuan penelitian. Selain itu, teknik member checking juga diterapkan dengan meminta konfirmasi dari informan terkait keakuratan data yang telah diperoleh, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Dengan penerapan metode ini, penelitian diharapkan dapat

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan wisata di Kabupaten Karo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengembangan daerah wisata oleh Pemerintah Kabupaten Karo, khususnya dalam pengelolaan Danau Lau Kawar, menjadi aspek penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata melalui perbaikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta promosi yang lebih intensif. Namun, berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, kondisi lingkungan eksternal, serta sikap para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Danau Lau Kawar dengan kerangka konsep dari teori Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, standar dan sasaran kebijakan pengembangan wisata Danau Lau Kawar telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, standar dan sasaran kebijakan yang jelas menjadi salah satu faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, serta menanamkan nilai-nilai sapta pesona pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan di Kabupaten Karo memahami standar dan sasaran yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Meskipun tujuan pengembangan pariwisata Danau Lau Kawar telah dirancang dengan jelas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum ada pembangunan infrastruktur yang signifikan. Fasilitas umum yang tersedia masih terbatas, dan beberapa yang telah ada mengalami kerusakan tanpa adanya upaya perbaikan dari pemerintah daerah. Selain itu, program pengembangan sektor pariwisata yang dirancang dalam kebijakan belum diimplementasikan secara optimal. Misalnya, minimnya promosi wisata serta kurangnya program pemberdayaan masyarakat dalam sektor wisata menyebabkan potensi pariwisata Danau Lau Kawar belum berkembang secara maksimal.

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, kebijakan yang memiliki standar dan sasaran yang jelas akan lebih mudah diimplementasikan jika pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman pelaksana kebijakan terhadap standar dan sasaran sudah cukup baik. Namun, implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai harapan karena kurangnya perhatian terhadap faktor-faktor lain yang memengaruhi keberhasilan kebijakan, seperti sumber daya dan koordinasi antar badan pelaksana.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan, teori Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi sumber daya manusia, pegawai yang bertanggung jawab dalam pengembangan wisata hanya mendapatkan arahan dan bimbingan tanpa pelatihan teknis yang berkelanjutan. Ketika dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya sosialisasi atau pengawasan dari pemerintah terkait perkembangan Danau Lau Kawar. Selain itu, jumlah tenaga

kerja yang terlibat dalam pengelolaan wisata masih sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan kawasan wisata tidak berjalan optimal.

Dari segi sumber daya finansial, pengembangan Danau Lau Kawar bergantung pada APBD Kabupaten Karo. Namun, dana yang dialokasikan untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas wisata, minimnya promosi daerah, serta tidak adanya upaya pemeliharaan dan perbaikan sarana yang telah tersedia. Seharusnya, dengan adanya anggaran yang memadai, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, serta promosi wisata agar destinasi ini lebih dikenal dan menarik lebih banyak wisatawan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut teori Van Meter dan Van Horn, karakteristik agen pelaksana berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pengembangan Danau Lau Kawar, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha seharusnya berkolaborasi dalam menjalankan kebijakan ini. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masing-masing agen pelaksana masih sangat terbatas. Pemerintah daerah, sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan, belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan pariwisata di Danau Lau Kawar. Tidak adanya pengawasan aktif dari instansi terkait menunjukkan lemahnya koordinasi antara badan pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Sebagai perbandingan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan wisata yang berhasil biasanya didukung oleh keterlibatan aktif antara pemerintah dan masyarakat. Di beberapa daerah lain, keberhasilan pengembangan wisata didorong oleh inisiatif pemerintah daerah yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Namun, dalam kasus Danau Lau Kawar, tidak ditemukan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata.

Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Teori Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya komunikasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha belum terjalin dengan baik. Hingga saat ini, tidak ada forum komunikasi yang mempertemukan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata Danau Lau Kawar.

Ketika pelaku usaha dan masyarakat diwawancarai, mereka menyatakan bahwa belum pernah ada pertemuan resmi dengan Dinas Pariwisata untuk membahas strategi pengembangan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat masih sangat lemah. Dalam penelitian sebelumnya, komunikasi yang baik antara pelaku kebijakan dan masyarakat terbukti mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur agar setiap pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata dapat berkontribusi secara maksimal.

Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sekitar Danau Lau Kawar masih belum stabil. Aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata hanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, seperti saat liburan atau akhir pekan. Namun, pada hari-hari biasa, jumlah wisatawan yang datang sangat minim, sehingga pelaku usaha sulit mendapatkan keuntungan yang stabil.

Dari segi sosial, masyarakat sekitar mendukung pengembangan wisata tanpa menghilangkan budaya lokal. Namun, ditemukan beberapa praktik pungutan liar di sekitar kawasan wisata yang dapat mengurangi kenyamanan wisatawan. Dari sisi politik, Danau Lau Kawar sering kali dijadikan lokasi kampanye oleh calon pemimpin daerah, namun setelah pemilihan selesai, tidak ada kebijakan konkret yang benar-benar mendukung pengembangan wisata.

Sikap Pelaksana (Disposisi)

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, sikap pelaksana kebijakan atau disposisi berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksana kebijakan setuju dengan pengembangan Danau Lau Kawar, mereka tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan kebijakan ini. Hingga saat ini, belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam bentuk program atau inisiatif baru untuk mengembangkan pariwisata di kawasan ini. Dalam penelitian sebelumnya, implementasi kebijakan yang berhasil sering kali ditandai dengan komitmen kuat dari pelaksana kebijakan. Namun, dalam kasus Danau Lau Kawar, sikap pasif pelaksana kebijakan menjadi hambatan utama dalam pengembangan wisata di daerah ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Danau Lau Kawar masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Meskipun Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata telah menetapkan standar dan sasaran yang jelas, penerapannya di lapangan belum optimal. Infrastruktur yang belum memadai, minimnya promosi wisata, serta kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan destinasi ini. Dari perspektif teori Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, serta koordinasi antar badan pelaksana. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha masih lemah, sumber daya manusia dan finansial terbatas, serta tidak adanya evaluasi yang sistematis terhadap kinerja pengelolaan wisata. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang belum stabil juga menjadi tantangan eksternal yang perlu diatasi.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, perbaikan infrastruktur wisata, serta pelaksanaan program promosi yang lebih intensif. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pengembangan fasilitas wisata, memberikan pelatihan kepada pelaku usaha lokal, serta membangun sistem komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, pemberian insentif kepada pelaku usaha dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya tarik Danau Lau Kawar. Dengan kebijakan yang lebih terarah dan implementasi yang lebih baik, diharapkan Danau Lau Kawar dapat berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagiastuti, N. K. (2017). Implementasi Undang-Undang Kepariwisata Dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Provinsi Bali. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 227.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.

- Daulay, L. S., Ginting, R., & Saleh, A. (2020). Komunikasi Pariwisata Pihak Pemerintah, Pengelola, Dan Masyarakat Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Padangsidempuan. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 3(1). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i1.809>
- Jary, D., & Jary, J. (2019). *Collins Dictionary of Sociology*. HarperCollins Publishers.
- Mariana Br Simamora, D., Masitho Batubara, B., & Suharyanto, A. (2022). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1185>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third edit). SAGE Publications, Inc.
- Muda, I., Angelia, N., & others. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugraha, D. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 304–313. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1202>
- Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Putri, F. R. Y. dan R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 386.
- Putri, R. D., Purnomo, A., & Suryanto, T. (2021). Peningkatan Kunjungan Wisatawan melalui Pemasaran Digital: Studi Kasus di Bali. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 18(2), 112–125.
- Rahmawati, L. (2019). Kendala dalam Implementasi Desa Wisata di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 45–58.
- Saputra, R., & Rahayu, S. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata di Bromo Tengger Semeru. *Jurnal Ekowisata Dan Konservasi*, 12(1), 78–92.
- Setiono, S. T., Afrizal, T., Supriyono, E., Wendra, R. M., & Nurfitriani, A. (2021). Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Semarang. *Perspektif*, 10(1), 26–35. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3943>
- Silviana, W., & Mubarak, A. (2020). Pengelolaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Pada Objek Wisata Pantai Carocok Painan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 48–57. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.131>
- Simarmata, H. M. P., & Saragih, R. S. (2020). Destination Image as a Strategy to Increase the Number of Tourists for Lake Toba “Monaco of Asia” in Samosir Regency. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 533–537.
- Sinuhaji, V. V., Siti, N., Siregar, S., & Jamil, B. (2019). Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Deskriptif Kualitatif Wisata Bukit Gundaling Berastagi) Marketing Communication Activities of the Karo District Tourism and Cultu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 105–118.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wijaya, H. (2022). Tantangan Infrastruktur dalam Pengelolaan Wisata Danau Toba. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Pariwisata*, 10(3), 156–170.